



Penyusunan dan Penyajian Indikator Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Barat, 2013

ABSTRAKSI

Penyusunan dan Penyajian Indikator Ekonomi Regional bertujuan untuk melihat progress pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Selain itu, juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi dalam mengambil kebijakan perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang. Kegiatan pengumpulan data sekunder dari berbagai publikasi baik yang bersumber dari BPS maupun instansi lain yang terkait sangat dibutuhkan dalam rangka mengenal Provinsi Sulawesi Barat. Jenis data yang diperlukan dalam Penyusunan dan Penyajian Indikator Ekonomi Regional dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang bersumber dari BPS, baik hasil pengolahan di BPS Kabupaten se-Sulawesi Barat maupun di BPS Provinsi. Sedangkan data sekunder merupakan data kompilasi produk administrasi dari instansi terkait baik institusi pada tingkat kabupaten se-Sulawesi Barat maupun institusi pada tingkat provinsi. Penyusunan dan penyajian Indikator Ekonomi Regional memuat angka PDRB dan turunannya (pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita), data kemiskinan, data ketenagakerjaan, indikator sosial ekonomi lainnya seperti Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi/IHK dan lain sebagainya.

TUJUAN DAN MANFAAT KEGIATAN

- Menyediakan data dan informasi guna mengidentifikasi daerah-daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih serta bentuk penanganan yang dianggap tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; - Menyediakan data dan informasi tentang indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam proses penyusunan perencanaan.

Penanggung Jawab Kegiatan

PENYELENGGARA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

ALAMAT PENYELENGGARA

JL.KH.ABD. MALIK PATTANA ENDENG No.14

NAMA

Drs. Eman Hermawan

JABATAN

Kabid. Perencanaan Pemerintahan Makro dan Pengolahan Data

ALAMAT

JL.KH.ABD.Malik Pattana Endeng No.14 Rangas Mamuju

TELEPON

04262325257

FAX

EMAIL

bapsulbar@gmail.com

Penanggung Jawab Teknis Kegiatan

NAMA

Muh. Rus'an AT, SE, M.Si

JABATAN

Kasubid Pengolahan Data & Pelaporan

ALAMAT

JL.KH.ABD.Malik Pattana Endeng No.14 Rangas Mamuju

TELEPON

04262325257

FAX

EMAIL

bapsulbar@gmail.com

Informasi Umum Kegiatan

FREKUENSI PENYELENGGARAAN

Tahunan

FREKUENSI PENGUMPULAN DATA

- Tahunan

TIPE PENGUMPULAN DATA

Longitudinal dan Cross Sectional

Metodologi

CARA PENGUMPULAN DATA

Kompilasi produk administrasi

CAKUPAN WILAYAH SURVEI

JENIS RANCANGAN SAMPEL

METODE PEMILIHAN SAMPEL STAGE TERAKHIR

KERANGKA SAMPEL

KESELURUHAN FRAKSI SAMPEL (*OVERAL SAMPLING FRACTION*)

PERKIRAAN *SAMPLING ERROR*

UNIT SAMPEL

-

UNIT OBSERVASI

Data dari BPS

Pengumpulan Data

METODE PENGUMPULAN DATA

- Lainnya

MELAKUKAN UJI COBA (PILOT STUDY)

Tidak

PETUGAS PENGUMPULAN DATA

- Lainnya

PERSYARATAN PENDIDIKAN TERENDAH PETUGAS PENGUMPULAN DATA

Akademi/Universitas

MELAKUKAN PELATIHAN PETUGAS

Tidak

JUMLAH SUPERVISOR/PENYELIA/PENGAWAS

2

JUMLAH ENUMERATOR/PENCACAH/PENGUMPUL DATA

10

Pengolahan Data, Penyajian, dan Analisis

METODE PENGOLAHAN

Input data (Data entry)

Penyahihan (Validasi)

TINGKAT PENYAJIAN YANG DIHARAPKAN

- Provinsi

- Lainnya

METODE ANALISIS

Analisis Deskriptif

UNIT ANALISIS

Kabupaten

PRODUK DATA YANG TERSEDIA UNTUK UMUM

Media Cetak

Data Mikro

JUDUL PUBLIKASI

Indikator Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Barat 2013

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan/
Persiapan 24 Jun 2013 s.d. 04 Jul 2013

Pengumpulan
Data 08 Jul 2013 s.d. 06 Sep 2013

| | |
|------------|------------------------------|
| Pengolahan | 08 Aug 2013 s.d. 27 Sep 2013 |
| Penyajian | 18 Oct 2013 s.d. 11 Nov 2013 |
| Analisis | 15 Nov 2013 s.d. 22 Nov 2013 |

Aksesibilitas

Direktorat Diseminasi Statistik
bpsdq@bps.go.id, www.bps.go.id

Persyaratan dan Penolakan

PERSYARATAN

Pengguna data harus menyebutkan nama kegiatan:

Penyusunan dan Penyajian Indikator Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Barat, 2013

PENOLAKAN

Pengguna data mengakui bahwa BPS tidak bertanggung jawab atas penggunaan data atau interpretasi atau kesimpulan berdasarkan penggunaan data apabila tidak diketahui atau tidak dikonsultasikan dengan BPS.